

SERI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN: JUMLAH DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK

BUKU PEMBEKALAN BAGI PKB / PLKB



PERTUMBUHAN PENDUDUK DI INDONESIA



Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

2016



SERI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN: JUMLAH DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK

BUKU PEMBEKALAN BAGI PKB / PLKB



PERTUMBUHAN PENDUDUK DI INDONESIA



Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

2016

Perpustakaan Nasional RI. : Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Rahardjo, Sancoyo

Buku Pembekalan Bagi PKB/PLKB, Pertumbuhan Penduduk di Indonesia / Sancoyo Rahardjo — Jakarta : Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan, BKKBN, 2016.

x, 22hal. ; 21 cm. – (Seri Pendidikan Kependudukan: Pertumbuhan Penduduk di Indonesia)

ISBN : 978-602-1564-58-5

KEPENDUDUKAN - PERTUMBUHAN PENDUDUK DI INDONESIA

1. Judul 2. Seri

No klasifikasi

Buku Pembekalan Bagi PKB/PLKB

Pertama kali diterbitkan oleh :

Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan (DITPENDUK) –
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Penanggung Jawab	: Darlis Darwis, SE, MM.
Penulis	: Ign. Sancoyo Rahardjo, SK
Editor	: Bambang Hendroyono, SPd., M.MPd. Sintawaty Sulisetyoningrum
Penyelarar	: dr. Popy Irawati, MPH Tim DITPENDUK
Desain sampul dan grafis	: Ianhartato

Cetakan Pertama Tahun 2016

Materi dapat diunduh di <https://cis.bkkbn.go.id/dalduk>

Dan dapat diperbanyak pihak lain dengan seizin DITPENDUK,

Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan-BKKBN,

Telp. 021-8004929 ext. 711. Email : ditpenduk@bkkbn.go.id

KATA SAMBUTAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang. Untuk itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi institusi yang berperan penting dalam mencapai penduduk tumbuh seimbang dan meningkatkan kualitas penduduk melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBP).

Jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat yaitu dari 238,5 juta pada tahun 2010 menjadi 305,6 juta pada tahun 2035. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia diproyeksikan cenderung akan terus menurun, yakni dari 1,38 persen menjadi 0,62 persen per tahun pada periode tahun 2010-2035. Akan terjadi peningkatan penduduk di usia produktif, sehingga beban ketergantungan (*dependency ratio*) diperkirakan turun dari 50,5 persen pada tahun 2010 menjadi 47,3 persen pada tahun 2035. (Sumber: BAPPENAS, dkk 2013: Proyeksi Penduduk 2010-2035). Jika tidak diimbangi dengan persiapan yang matang, kondisi ini akan mendorong munculnya berbagai permasalahan kependudukan yang dikhawatirkan akan menghambat pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga menjadi salah satu program yang mendukung pencapaian 9 Agenda Prioritas Pembangunan (*NAWACITA*) yakni “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”. Oleh karenanya, perlu ada upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran keluarga dan masyarakat tentang kondisi kependudukan dan berbagai permasalahannya.

Sejak tahun 2011, BKKBN melalui Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran keluarga dan masyarakat tentang kondisi kependudukan dan berbagai permasalahannya. Salah satu upaya tersebut adalah menerbitkan materi pendidikan kependudukan melalui jalur-jalur pendidikan yang ada, baik formal, nonformal maupun informal. Diuraikan 5 (lima) isu kependudukan yang saat ini sedang berkembang, yakni: 1) Dinamika dan penambahan penduduk; 2) Penduduk Usia Produktif; 3) Penduduk Usia Remaja; 4) Penduduk Usia Lanjut; dan 5) Urbanisasi.

Kami menyambut baik serta mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis dan para mitra BKKBN yang telah ikut berkontribusi dalam penyusunan buku materi pendidikan kependudukan ini.

Kami berharap buku ini dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dalam upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan dan berbagai permasalahannya kepada seluruh elemen bangsa. Secara khusus, melalui buku ini diharapkan dapat memberikan perubahan sikap dan perilaku anak, remaja, keluarga, pemangku kebijakan dan elemen bangsa lainnya dalam menghadapi tantangan dan masalah kependudukan.

Jakarta, November 2016

Dr Kepala BKKBN,



Surya Chandra Surapaty

KATA PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karuniaNya buku-buku Materi-materi Pendidikan Kependudukan dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan materi-materi kependudukan dilatarbelakangi oleh diberlakukannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada pasal 17 yang mengamanatkan bahwa pembangunan wawasan kependudukan merupakan upaya peningkatan pemahaman pembangunan kependudukan yang berkelanjutan untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas. Oleh karena itu pendekatan yang paling efektif dalam membentuk pola pikir masyarakat terhadap sikap dan perilaku dapat dilakukan melalui pendekatan pendidikan, baik itu melalui Jalur Formal, Non Formal dan Informal.

Keberhasilan pelaksanaan kerjasama pendidikan kependudukan akan sangat berdampak pada meningkatnya pengetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang kondisi kependudukan di Indonesia serta timbal balik antara perkembangan kependudukan dengan kehidupan sosial, ekonomi, politik, ketahanan nasional, sumberdaya dan lingkungan hidup. Diharapkan akan tumbuh sikap dan perilaku yang rasional dan bertanggung jawab terhadap masalah kependudukan.

Buku-buku Materi Pendidikan Kependudukan disusun sebagai bahan bacaan dan referensi bagi para pengelola dan pendidik serta pembaca dan peminat materi-materi kependudukan sesuai dengan

tema di setiap buku yang diterbitkan oleh Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan. Materi-materi pendidikan kependudukan dituangkan kedalam 5 (lima) isu kependudukan yaitu: 1) Dinamika dan penambahan penduduk; 2) Penduduk Usia produktif; 3) Penduduk Usia Remaja; 4) Penduduk Usia Lanjut; dan 5) Urbanisasi.

Untuk itu diharapkan para pembaca dan pengguna buku ini bisa mendapatkan manfaat serta dapat digunakan untuk memperluas wawasan mengenai pendidikan kependudukan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan bangsa dan Negara.

Akhirnya saya sampaikan terimakasih kepada semua pihak terutama para mitra kerja yang telah turut membantu dalam penyusunan buku-buku materi pendidikan kependudukan, semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi kemajuan kerjasama pendidikan kependudukan dimasa mendatang.

Jakarta, November 2016
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk


Dr. Wendy Hartanto, MA

Daftar Isi

Kata Sambutan	v
Kata Pengantar	vii
➡ Wajah Penduduk Kita	1
➡ Fenomena Kependudukan Tanah Air	3
➡ Menimba Masalah dari Padatnya Penduduk	7
➡ Solusinya Program KB	17

WAJAH PENDUDUK KITA

DEWASA ini Indonesia dihuni sedikitnya oleh 245 juta jiwa penduduk. Mereka tersebar dari Sabang sampai Merauke (data BPS 2010). Persebarannya tidak merata antar satu wilayah dengan wilayah lain. Sebagian besar penduduk “menyemut” di Pulau Jawa.

UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mendefinisikan penduduk sebagai orang yang mencakup dirinya sebagai seorang pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga Negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal disuatu tempat dalam batas dan waktu tertentu.

Secara lebih jelas, Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan bahwa penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.



Padatnya penduduk, memicu banyak masalah.(foto: repro)

Yang unik, penduduk Indonesia memiliki ragam budaya, baik suku, agama ataupun bahasa. Menurut BPS 2010, Indonesia memiliki 1.128 suku, 726 ragam bahasa dan 6 agama yang diakui pemerintah.

Kemajemukan dan keragaman penduduk yang beraneka banyaknya dapat dipandang menjadi dua pandang yang berlawanan, yakni penduduk di pandang sebagai modal pembangunan atau tantangan pembangunan. Tantangan tersebut meliputi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan utamanya berkaitan dengan jumlah yang sangat besar dan terus meningkat, persebarannya yang tidak merata, atau kualitas penduduk yang masih rendah.

Penduduk menjadi tantangan dalam pembangunan karena memunculkan berbagai masalah kependudukan seperti kemiskinan dan angka pengangguran yang masih tinggi, jumlah penduduk yang begitu tinggi, kualitas penduduk rendah, tingkat pendidikan rendah, polusi, dan masih banyak lagi permasalahan yang menjadi perhatian kita.

Permasalahan kependudukan seperti ini tidak hanya terjadi di negara miskin atau berkembang, tetapi juga terjadi di negara maju meskipun persentasenya lebih kecil.

Di Indonesia, beberapa permasalahan kependudukan muncul tanpa bisa ditolak. Jika dikaji, pangkal permasalahannya meliputi :

1. Jumlah penduduk yang besar dan pertambahan penduduk yang cepat.
2. Kualitas penduduk
 - a. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan
 - b. Rendahnya tingkat pendidikan
Masih banyak angka buta huruf, tingginya angka putus sekolah, sarana pendidikan belum memadai, rendahnya pemahaman pentingnnya pendidikan.
 - c. Rendahnya tingkat kemakmuran
Tingginya pengangguran, kemiskinan desa-kota, rendahnya upah, jauhnya rentang si kaya-miskin.
3. Pendayagunaan sumber daya manusia rendah karena kurangnya kompetensi ■

FENOMENA KEPENDUDUKAN TANAH AIR

PENGENDALIAN pertumbuhan penduduk memang bukan sebatas persoalan Indonesia saja. Pada akhir 2011, PBB mengumumkan penduduk dunia telah mencapai tujuh miliar. Jumlah yang demikian besar, dan bisa menimbulkan masalah jika tidak dikelola dengan baik. Bukankah penduduk membutuhkan makanan, lahan untuk tinggal, dan kebutuhan primer dan sekunder. Semua kebutuhan itu bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk.

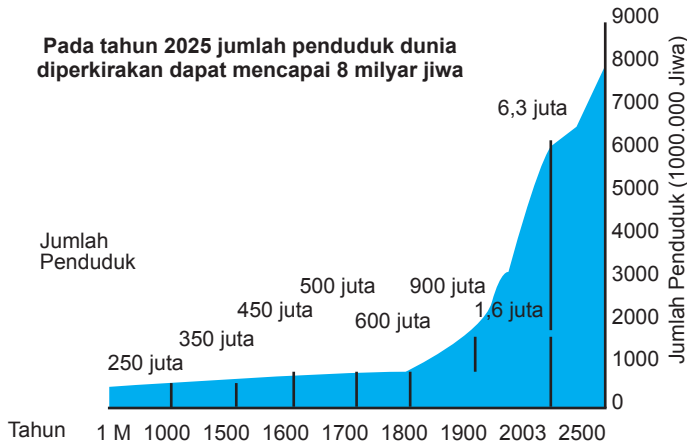
Ironisnya, luas bumi terbatas. Jika penduduk tidak dikendalikan, bumi suatu saat tidak akan mampu lagi untuk mencukupi kebutuhan hidup penduduk. Bayangkan, dari seluruh luas bumi, hanya 17 persen yang bisa dan layak dihuni.

Daerah dengan kepadatan penduduk tinggi akan menyebabkan tekanan penduduk terhadap lahan menjadi meningkat. Nilai tekanan penduduk yang sudah mencapai ambang batas akan berpotensi menimbulkan beberapa ancaman permasalahan seperti konflik agraria,



konflik politik, kelaparan, kemiskinan, sulitnya mencari kerja, bencana alam, dan masalah lainnya.

Tak ada tindakan lain yang harus segera dilakukan, selain melalui upaya pengendalian jumlah penduduk, perbaikan mutu dan kualitas penduduk, serta pemanfaatan SDM yang tepat. Semua itu akan menjadikan jumlah penduduk yang sudah sedemikian besar menjadi modal pembangunan yang kuat.



Tujuh milyar jiwa jumlah penduduk dunia, bukanlah sekedar angka statistik. Semestinya sudah menjadi *alarm* agar kita semua segera memperkuat program pengendalian pertumbuhan populasi penduduk. Badan Sosial Ekonomi PBB mencoba menjelaskan tentang pentingnya pengendalian penduduk melalui proyeksi penduduk.

Berikut penjelasannya. Jika penambahan penduduk dunia semakin tinggi, tahun 2050 jumlah penduduk dunia akan mencapai 10,6 milyar jiwa, dan bertambah lagi menjadi 15,8 milyar pada tahun 2100. Dengan kata lain, 90 tahun kedepan jumlah penduduk dunia akan menjadi dua kali lipat dari kondisi saat ini.

Jika penambahan penduduk dunia sedang, pada 2050 jumlah penduduk dunia akan mencapai 9,3 milyar jiwa, dan bertambah menjadi 10,1 milyar jiwa tahun 2100. Namun, jika penambahan penduduk dunia rendah, pada 2050 jumlah penduduk dunia hanya mencapai 8,1 milyar jiwa, dan turun menjadi 6,2 pada tahun 2100.



Penduduk dunia. (foto: repro)

Proyeksi badan dunia tersebut memberikan beberapa pilihan tentang jumlah penduduk dunia yang dapat terjadi berdasarkan tiga skenario pertambahan. Jika pilihannya dengan pertambahan yang rendah, upaya pengendalian penduduk harus dilakukan mulai sekarang. Apa yang dilakukan saat ini akan menentukan masa depan.

Deskripsi Indonesia

Berdasarkan proyeksi yang dilakukan PBB, penduduk Indonesia tahun 2050 masih menjadi penyumbang terbesar jumlah penduduk dunia. Pasalnya, pada 2050 Indonesia menjadi negara keenam di dunia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Hal itu menggambarkan bahwa pertambahan penduduk di Indonesia masih tinggi.

Posisi Indonesia itu membawa konsekuensi. Satu di antaranya pemerintah harus memperkuat kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk. PBB telah menyalakan alarm kependudukan bagi Indonesia untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan potensi dan ancaman kependudukan di negeri ini.

Perencanaan sektoral dalam kependudukan (pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, pangan, dan lainnya) harus disiapkan. Ini agar tingginya jumlah penduduk yang mungkin terjadi pada 2050 tidak

bermuara pada permasalahan. Sejatinya justru menuju terciptanya tujuan pembangunan seperti usia harapan hidup dan sehat, lebih berpendidikan, dan lebih terampil. ■

PROYEKSI PENDUDUK MENURUT PROVINSI,
2010-2035 (ribuan)

Provinsi		Tahun					
		2010	2015	2020	2025	2030	2035
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Aceh	4 523,1	5 002,0	5 459,9	5 870,0	6 227,6	6 541,4
12	Sumatera Utara	13 028,7	13 937,8	14 703,5	15 311,2	15 763,7	16 073,4
13	Sumatera Barat	4 865,3	5 196,3	5 498,8	5 757,8	5 968,3	6 130,4
14	Riau	5 574,9	6 344,4	7 128,3	7 898,5	8 643,3	9 363,0
15	Jambi	3 107,6	3 402,1	3 677,9	3 926,6	4 142,3	4 322,9
16	Sumatera Selatan	7 481,6	8 052,3	8 567,9	9 000,4	9 345,2	9 610,7
17	Bengkulu	1 722,1	1 874,9	2 019,8	2 150,5	2 264,3	2 360,6
18	Lampung	7 634,0	8 117,3	8 521,2	8 824,6	9 026,2	9 136,1
19	Kep. Bangka Belitung	1 230,2	1 372,8	1 517,6	1 657,5	1 788,9	1 911,0
21	Kepulauan Riau	1 692,8	1 973,0	2 242,2	2 501,5	2 768,5	3 050,5
	Pulau Sumatera	50 860,3	55 272,9	59 337,1	62 898,6	65 938,3	68 500,0
31	DKI Jakarta	9 640,4	10 177,9	10 645,0	11 034,0	11 310,0	11 459,6
32	Jawa Barat	43 227,1	46 709,6	49 935,7	52 785,7	55 193,8	57 137,3
33	Jawa Tengah	32 443,9	33 774,1	34 940,1	35 958,6	36 751,7	37 219,4
34	DI Yogyakarta	3 467,5	3 679,2	3 882,3	4 064,6	4 220,2	4 348,5
35	Jawa Timur	37 565,8	38 847,6	39 886,3	40 646,1	41 077,3	41 127,7
36	Banten	10 688,6	11 955,2	13 160,5	14 249,0	15 201,8	16 033,1
	Pulau Jawa	137 033,3	145 143,6	152 449,9	158 738,0	163 754,8	167 325,6
51	Bali	3 907,4	4 152,8	4 380,8	4 586,0	4 765,4	4 912,4
52	N T B	4 516,1	4 835,6	5 125,6	5 375,6	5 583,8	5 754,2
53	N T T	4 706,2	5 120,1	5 541,4	5 970,8	6 402,2	6 829,1
	Bali dan Kep. Nusa Tenggara	13 129,7	14 108,5	15 047,8	15 932,4	16 751,4	17 495,7
61	Kalimantan Barat	4 411,4	4 789,6	5 134,8	5 432,6	5 679,2	5 878,1
62	Kalimantan Tengah	2 220,8	2 495,0	2 769,2	3 031,0	3 273,6	3 494,5
63	Kalimantan Selatan	3 642,6	3 989,8	4 304,0	4 578,3	4 814,2	5 016,3
64	Kalimantan Timur	3 576,1	4 068,6	4 561,7	5 040,7	5 497,0	5 929,2
	Pulau Kalimantan	13 850,9	15 343,0	16 769,7	18 082,6	19 264,0	20 318,1
71	Sulawesi Utara	2 277,7	2 412,1	2 528,8	2 624,3	2 696,1	2 743,7
72	Sulawesi Tengah	2 646,0	2 876,7	3 097,0	3 299,5	3 480,6	3 640,8
73	Sulawesi Selatan	8 060,4	8 520,3	8 928,0	9 265,5	9 521,7	9 696,0
74	Sulawesi Tenggara	2 243,6	2 499,5	2 755,6	3 003,0	3 237,7	3 458,1
75	Gorontalo	1 044,8	1 133,2	1 219,6	1 299,7	1 370,2	1 430,1
76	Sulawesi Barat	1 164,6	1 282,2	1 405,0	1 527,8	1 647,2	1 763,3
	Pulau Sulawesi	17 437,1	18 724,0	19 934,0	21 019,8	21 953,5	22 732,0
81	Maluku	1 541,9	1 686,5	1 831,9	1 972,7	2 104,2	2 227,8
82	Maluku Utara	1 043,3	1 162,3	1 278,8	1 391,0	1 499,4	1 603,6
	Kep. Maluku	2 585,2	2 848,8	3 110,7	3 363,7	3 603,6	3 831,4
91	Papua Barat	765,3	871,5	981,8	1 092,2	1 200,1	1 305,0
94	Papua	2 857,0	3 149,4	3 435,4	3 701,7	3 939,4	4 144,6
	Pulau Papua	3 622,3	4 020,9	4 417,2	4 793,9	5 139,5	5 449,6
	Indonesia	238 518,8	255 461,7	271 066,4	284 829,0	296 405,1	305 652,4

MENIMBA MASALAH DARI PADATNYA PENDUDUK

INDONESIA memang “kaya” akan penduduk, tentunya dalam kuantitas. Jumlahnya terus meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan 1,6 persen per tahun berdasarkan Sensus Penduduk 2010. Bagaimana jika dibiarkan? Tentu dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Apa saja permasalahannya? Simak keterangan di bawah ini.

- Tekananan Penduduk dan Lingkungan, yaitu berkurangnya lahan pertanian dan rusaknya lingkungan akibat pemukiman yang semakin padat dan perilaku manusia yang tidak peduli lingkungan.



Lahan pertanian, menghijau, asri.(foto: repro)

- Kemiskinan. Penduduk yang sangat banyak tidak seluruhnya mampu untuk memperoleh kebutuhan ekonomi.
- Pengangguran. Terjadi karena lapangan kerja tidak sebanyak pencari kerja. Banyaknya pencari kerja muncul akibat semakin meningkatnya jumlah penduduk.
- Rawan pangan. Terjadi karena kebutuhan pangan semakin meningkat dengan adanya penambahan penduduk, sedangkan luas pertanian akan berkurang. Akibatnya, produksi padi tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan seluruh penduduk.

Selain itu, penambahan penduduk yang besar akan meningkatkan kebutuhan penduduk terhadap tempat tinggal. Akibatnya, semakin luas lahan yang diperlukan untuk membangun pemukiman dan fasilitas sosial ekonomi penunjang kebutuhan manusia, di antaranya sekolah, fasilitas kesehatan, gedung-gedung perkantoran, pasar dan fasilitas umum lainnya.

Terbatasnya lahan menyebabkan lahan pertanian akan berkurang karena telah diubah fungsinya untuk perluasan lahan bangunan. Banyak bukti menunjukkan, jumlah petak sawah semakin sedikit karena lahan sawah telah berubah menjadi pemukiman atau kawasan industri dan fasilitas umum.

Kebutuhan akan bangunan yang semakin besar menyebabkan padatnya bangunan. Padatnya bangunan tanpa disertai penataan yang benar dan kesadaran untuk menjaga lingkungan mengakibatkan lingkungan permukiman menjadi kumuh. Hal ini umumnya terjadi di lingkungan perkotaan. Begitu banyak dijumpai bangunan-bangunan kumuh akibat terbatasnya jumlah lahan untuk manusia dan rendahnya kesadaran akan kesehatan lingkungan.

Itu semua bermuara pada isu kemiskinan. Yaitu sebuah keadaan dimana terjadi kekurangan dalam hal ketersediaan pangan, pakaian, tempat berlindung dan air minum. Kondisi kemiskinan berhubungan erat dengan kualitas hidup.

Data Bappenas (2004) memperlihatkan, kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.



Padatnya pemukiman akibat pertambahan penduduk. (foto: wordpress.com)



Sampah menumpuk di badan kali, dampak padatnya penduduk. (foto: repro)

Beberapa penyebab kemiskinan:

- Kerasnya hidup dan ketidakpastian yang harus dijalani.
- Keterbatasan sumber daya alam dan pemanfaatan alam yang kurang optimal.
- Struktur pekerjaan.
- Ketidakmampuan ekonomi.

Dewasa ini tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan di Indonesia sebesar 13,33 persen atau 31 juta jiwa. Sedikitnya 16 provinsi memiliki tingkat kemiskinan diatas rata-rata nasional dan 17 provinsi berada di bawah rata-rata nasional. Kemiskinan di pedesaan sebesar 16,56 persen dan di perkotaan 9,87 persen.

Kemiskinan merupakan ancaman. Untuk mencegahnya, setiap orang harus menghindari dari budaya miskin, diantaranya budaya boros, menunggu bantuan orang lain dan enggan berkreasi, serta malas.

Tenaga Kerja dan Pangan

Penduduk dalam jumlah besar akan memiliki potensi masalah dalam sektor ketenagakerjaan. Hampir 22 juta dari 44 juta penduduk usia muda masuk pasar kerja tanpa keterampilan. Tingkat pengangguran di Indonesia 7,41 % atau sekitar 17,6 juta jiwa.

Potret lainnya, mutu pekerja di Indonesia paling banyak didominasi lulusan SD. Sektor informal di Indonesia sebesar 65 persen. Masalah *supply* dan *demand* masih menjadi masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

Tingginya pertumbuhan penduduk berakibat pada tingginya kebutuhan akan sandang, papan dan pangan. Terkait pangan, saat ini konsumsi beras per kapita oleh masyarakat Indonesia mencapai 139 kilogram per kapita per tahun dan terus meningkat setiap tahunnya (PANAP Rice Sheets.).



Tenaga kerja Indonesia, mencari hidup di negara seberang. (foto: repro)

Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 sebesar 237,6 juta jiwa, berarti kebutuhan beras per tahun dalam hitungan kasar adalah sebesar 33.026 juta ton per tahun pada tahun 2010 atau pada tahun 2014 dalam survey pertanian terhitung 56 juta ton per tahun kebutuhan beras untuk masyarakat Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa produksi padi 2014 mencapai 70,83 juta ton gabah kering giling (GKG), angka ini turun 450 ribu ton atau 0,63 persen dibanding 2013. Penurunan produksi padi paling besar terjadi di Pulau Jawa hingga 830 ribu ton, sedangkan di luar Jawa mengalami penurunan 390 ribu ton.

**Proyeksi dan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Penduduk Menurut Kelompok Bahan Pangan
Tahun 2013 - 2015**

No	Kelompok Bahan Pangan	Tahun					
		2013		2014		2015	
		Proyeksi (3)	Realisasi (4)	Proyeksi (5)	Realisasi (6)	Proyeksi (7)	
(1)	(2)						
1	Padi-padian	25,974,708.60	26,686,685.90	25,915,525.90	27,232,340.00	25,641,968.10	
		23,402,024.40	23,788,542.10	23,422,464.30	24,249,505.00	23,251,690.90	
		625,533.80	402,800.90	658,746.60	389,445.00	687,702.40	
		1,947,150.40	2,495,342.90	1,834,315.00	2,593,390.00	1,702,574.80	
2	Umbi-umbian	7,216,399.80	2,908,890.50	8,285,956.40	2,924,287.00	9,324,352.00	
		5,031,349.50	1,674,406.00	5,818,055.60	1,647,201.00	6,584,108.00	
		1,132,270.80	619,579.30	1,294,018.10	690,921.00	1,450,717.40	
		731,042.50	400,758.70	824,008.10	382,075.00	913,414.70	
		119,938.80	110,878.50	127,524.40	100,385.00	134,325.70	
		201,798.20	103,268.00	222,350.20	103,705.00	241,786.20	
3	Pangan hewani	11,561,464.90	8,877,706.80	12,805,101.90	9,443,449.00	13,986,528.00	
		646,830.40	445,166.90	724,864.90	478,941.00	799,640.00	
		1,447,999.50	1,244,010.40	1,601,011.00	1,389,808.00	1,746,159.20	
		2,253,888.10	1,798,902.80	2,474,955.50	1,872,760.00	2,683,336.00	
		560,230.60	574,134.60	591,568.90	613,978.00	619,136.30	
		6,652,516.30	4,815,492.10	7,412,701.60	5,087,962.00	8,138,256.50	
4	Minyak dan Lemak	1,856,262.00	2,339,311.90	1,868,017.20	2,488,044.00	1,864,870.40	
		651,885.10	299,073.20	752,912.30	238,654.00	851,240.00	
		1,172,753.30	1,997,384.00	1,083,448.80	2,201,181.00	982,200.00	
		31,623.60	42,854.70	31,656.10	48,209.00	31,430.40	

5	Buah/Biji berminyak	805,886.40	639,003.30	871,603.20	643,581.00	932,435.30
	Kelapa	711,901.70	541,861.20	771,780.70	545,245.00	827,392.40
	Kemiri	93,984.70	97,142.10	99,822.50	98,336.00	105,042.90
6	Kacang-kacangan	2,777,637.30	2,099,711.40	3,028,677.60	2,131,990.00	3,263,523.20
	Kedele	2,277,350.00	1,923,487.50	2,454,176.60	1,968,388.00	2,616,967.10
	Kacang tanah	224,004.80	78,970.50	256,600.10	76,749.00	288,212.20
	Kacang hijau	211,724.90	70,225.50	246,063.80	69,454.00	279,565.90
	Kacang lainnya	64,557.60	27,027.90	71,837.10	17,399.00	78,778.00
7	Gula	2,518,912.70	2,299,571.40	2,666,499.10	2,259,768.00	2,797,305.60
	Gula pasir	2,258,889.20	2,125,162.90	2,384,465.90	2,091,501.00	2,494,817.80
	Gula merah	260,023.50	174,408.50	282,033.20	168,267.00	302,487.80
8	Sayuran dan buah	21,019,328.90	21,532,675.60	22,235,318.60	23,591,118.00	99,648,986.40
	Sayur	13,653,141.500	14,061,796.90	14,288,630.80	15,041,097.00	14,828,868.40
	Buah	7,366,187.40	7,470,878.70	7,946,687.80	8,550,021.00	84,820,118.00
	Jumlah Penduduk	246,979,816	246,979,816	252,164,800	252,164,800	255,461,700

Sumber : Proyeksi Sasaran PPH - BPS

Produksi padi menyusut karena terjadi penurunan luas panen 41,61 ribu hektare (ha) atau 0,30 persen dan penurunan produktivitas sebesar 0,17 kuintal atau (0,33 persen). Dapat diartikan sebenarnya produksi padi Indonesia mengalami surplus yang cukup, namun yang dikhawatirkan adalah penurunan luas lahan pertanian yang terus diganti peruntukannya sebagai perumahan maupun peruntukan lainnya. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, mengungkap fakta, sebanyak 110 ribu hektar lahan pertanian terancam dialih-fungsikan menjadi lahan non pertanian tiap tahun

Penduduk dalam jumlah besar jelas mengancam kerawanan pangan. Kerawanan pangan diartikan sebagai kondisi di mana suatu wilayah tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan untuk konsumsi penduduknya. Pangan merupakan kebutuhan primer penduduk disamping sandang dan papan. Bayangkan jika itu tak mencukupi gara-gara penduduk terlampaui banyak.

Secara umum, jumlah penduduk yang tinggi akan mengancam kerawanan pangan jika tidak direncanakan dengan bijak. Semakin banyak jumlah penduduk, selain menambah jumlah konsumsi kebutuhan bahan pangan. Juga mengurangi luas lahan untuk tanaman pangan karena lahan akan dikonversi untuk kebutuhan tempat tinggal dan bangunan lainnya.

Sebagai ilustrasi, tahun 2011 konsumsi beras menjadi 33,42 juta ton atau meningkat 0,36 juta ton dari tahun sebelumnya. Jika pertambahan ini terus terjadi bukan tidak mungkin kerawanan pangan akan merembet kedaerah-daerah yang selama ini aman pangan.

Penurunan produksi beras di beberapa daerah lumbung padi di Indonesia (Banyumas, Kudus, Sukoharjo, Gorontalo, Lampung dan lainnya) merupakan bukti nyata adanya ancaman pangan yang serius bagi negara yang memiliki jumlah penduduk besar seperti Indonesia.

Tekanan Penduduk

Mengurai kepadatan penduduk adalah penting. Apa yang dimaksud dengan kepadatan penduduk? Adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan wilayah. Semakin banyak penduduknya, wilayah tersebut masuk kategori kawasan padat penduduk.



*Pertumbuhan penduduk yang tak terkendali mengancam ketersediaan pangan nasional.
(foto: repro)*

Pulau Jawa masuk dalam wilayah berpenduduk padat, sejak 1930 hingga kini. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap tekanan penduduk yang ada di dalamnya. Sarana dan prasarana yang baik serta berbagai kemudahan lain mendorong penduduk di pulau lain berdatangan ke Pulau Jawa mengadu peruntungan.

Maka, pengendalian pertumbuhan penduduk adalah kata kuncinya. Ini agar penduduk tersebar merata di wilayah-wilayah Indonesia. Selain pemerataan penduduk, pemerataan pembangunan juga mutlak dilakukan. Jika pemerataan pembangunan tercapai, penduduk akan dengan sendirinya menuju daerah tersebut tanpa diperintah.

Pembangunan fisik seperti gedung pemerintahan, gedung sekolah, pasar dan kegiatan ekonomi lain, jalan, serta sarana prasarana lain menjadi penting sebagai “gula-gula” atau faktor penarik agar penduduk menjadi tertarik untuk hijrah ke daerah itu. Tidak lagi menjadikan Pulau Jawa sebagai “mimpi” masa depan mereka.

Dengan begitu akan terjadinya simbiosis mutualisme SDA dan SDM Jawa dan luar Jawa. Langkah ini harus menjadi prioritas banyak pihak agar Indonesia segera mencapai kemakmuran bersama.

Jumlah penduduk yang semakin besar pada 2025 atau pada 2050 memunculkan harapan penduduk tidak lagi terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi sudah merata persebarannya di seluruh pulau di Indonesia. Itu bisa terjadi bila gerakan distribusi penduduk dilakukan jauh-jauh hari.

Jika saja distribusinya tidak merata, penduduk yang padat di suatu wilayah dapat menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain:

1. Hankam, yaitu masalah pertahanan dan keamanan suatu negara meliputi masalah perbatasan, kedaulatan, dan potensi konflik horizontal.
2. Kerawanan sosial, utamanya di daerah padat penduduk. Hal ini karena tekanan penduduk yang tinggi menyebabkan singgungan kepentingan antar penduduk sangat mudah terjadi yang berujung kepada masalah kerawanan sosial.
3. Inefisiensi Ekonomi, terjadi karena daerah padat akan memberikan beban yang lebih berat dari sisi perekonomian, sehingga efisiensi sulit dicapai.

Hankam-Sosial

Jumlah penduduk yang banyak seharusnya menjadi modal kuat dalam menjaga keutuhan NKRI. Namun distribusi penduduk yang tidak merata menyebabkan pertahanan dan keamanan hanya terpusat di daerah yang padat penduduknya dan mengesampingkan daerah dengan penduduk sedikit dan jauh dari jangkauan. Akibatnya, kedaulatan bangsa lemah dan ancaman kehilangan pulau terluar menjadi besar.

Penduduk yang begitu besar dengan persebaran yang tidak merata dapat mejadi *boomerang* jika tidak dikelola dengan baik. Berbagai konflik yang berkaitan dengan unsur SARA (suku, agama, ras, antar golongan) dan konflik agraria merupakan bukti nyata pentingnya program distribusi penduduk.

Potensi masalah akibat distribusi penduduk yang tidak merata lainnya adalah kerawanan sosial. Daerah dengan distribusi penduduk padat akan memiliki tingkat kerawanan sosial yang tinggi dibandingkan dengan daerah dengan distribusi penduduk rendah.



Konflik sosial, buah negatif dari persoalan kependudukan.(foto: repro)

Adanya kepentingan yang saling bergesekan dan banyak jumlah individu yang terlibat di dalamnya merupakan faktor tingginya kerawanan sosial di daerah padat. Hal ini yang menjadikan daerah perkotaan memiliki potensi kerawanan sosial yang tinggi dibandingkan daerah pedesaan.

Tawuran, kriminalitas, konflik verbal, narkoba merupakan beberapa kerawanan sosial yang mengancam daerah kota. Hal ini sangat kontras dibandingkan daerah pedesaan atau daerah dengan penduduk sedikit. Penyebabnya adalah rendahnya kompetisi di daerah jarang penduduk menjadi penyebab rendahnya konflik sosial. Untuk itu, distribusi penduduk di daerah padat harus dilakukan untuk mengurangi kerawanan sosial di wilayah tersebut. ■

SOLUSINYA PROGRAM KB

LALU, apa jalan keluar atau solusinya? Perencanaan jumlah anak adalah satu upaya untuk mengerem laju pertumbuhan penduduk. Penduduk diharapkan mampu mengembangkan dengan baik manajemen jumlah anak yang ideal: “2 Anak Cukup”. Program KB menjadi salah satu solusi.



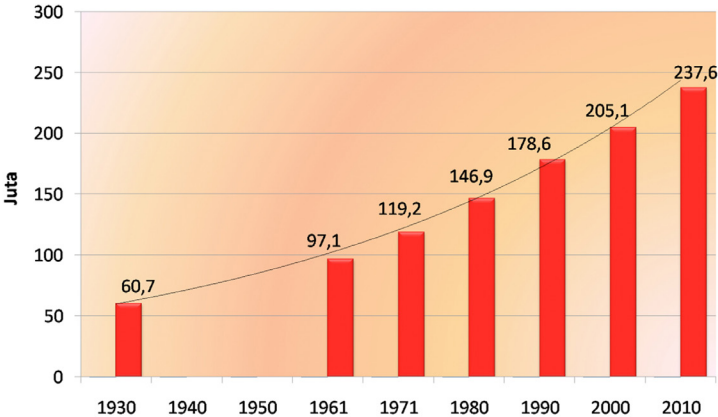
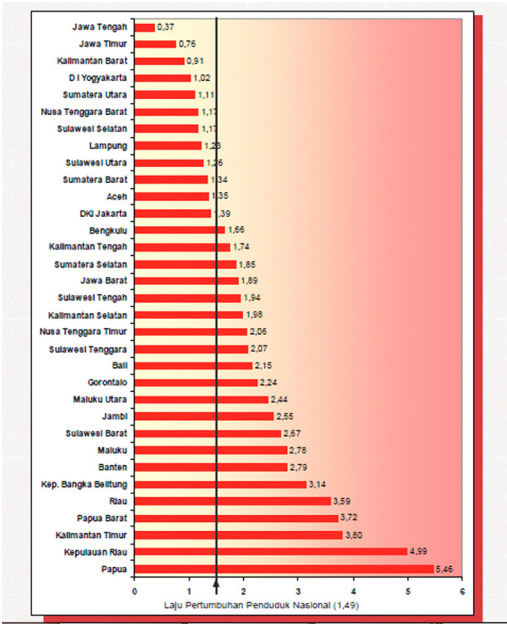
Sumber: BPS 2010

Melalui program KB, *total fertility rate* (TFR-rata-rata wanita subur melahirkan) diharapkan semakin turun dari posisi saat ini yang berada pada posisi angka 2,6 (BPS, 2010). Memang, faktor utama yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk adalah tingkat fertilitas. Meskipun tingkat fertilitas menurun, kalau jumlah ibunya besar sebagai akibat tingkat kelahiran yang tinggi di masa lalu serta perbaikan kesehatan, jumlah bayi yang lahir masih akan tetap banyak jumlahnya.

Tahun 2012, angka fertilitas remaja usia 15-19 di Indonesia mengalami peningkatan. Dari 35 kelahiran per 1000 perempuan tahun 2011, meningkat menjadi 48 kelahiran per 1000 perempuan pada tahun 2012. Sedangkan target nasional untuk fertilitas pada remaja adalah 30 kelahiran per perempuan.

Kejadian tingginya ASFR pada remaja disebabkan oleh rata-rata Usia Kawin Pertama (UKP) yang masih rendah. Usia kawin pertama adalah usia di mana seseorang melakukan hubungan intim untuk yang pertama kali. Rata-rata usia kawin pertama di Indonesia menurut BPS masih cukup rendah, di bawah 20 tahun.

Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2010



Sumber: BPS 2010

TABEL 1
Provinsi di Indonesia menurut Total Fertility
Rata/TFR pada tahun 2008 & 2012

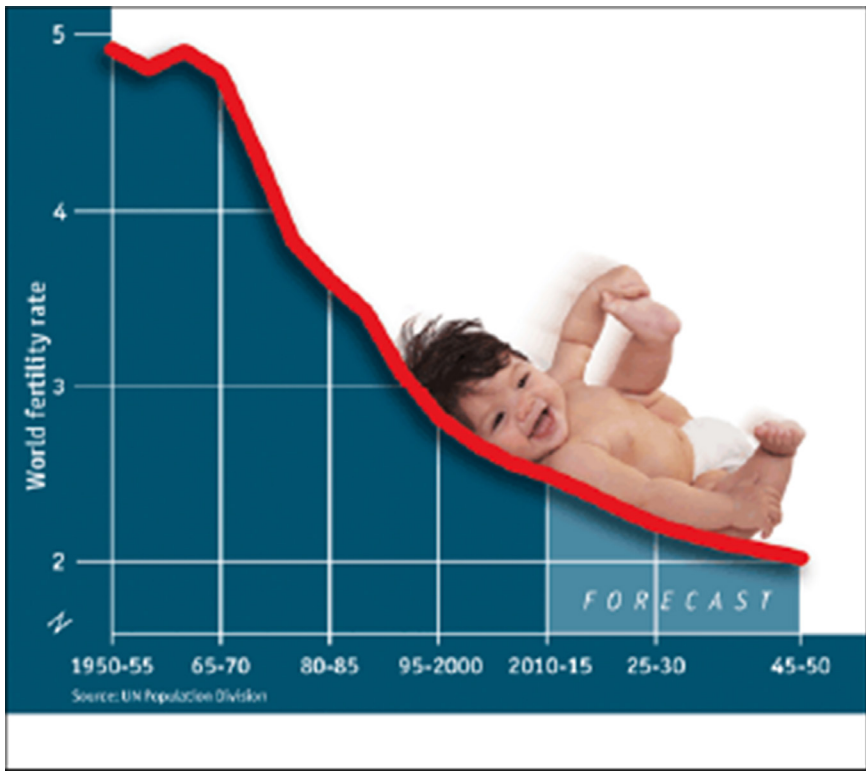
Wilayah	TFR 2006/ 2008	TFR 2012	Perbedaan TFR 2012-2008
Indonesia	2,41	2,6	0,19
Papua	2,87	3,5	0,63
Papua Barat	3,17	3,7	0,53
DKI Jakarta	1,81	2,3	1,49
Kalbar	2,63	3,1	0,47
Jateng	2,19	2,5	0,31
Jatim	2	2,3	0,30
Sulbar	3,32	3,6	0,28
Sulteng	2,94	3,2	0,26
Lampung	2,45	2,7	0,25
Sumsel	2,55	2,8	0,25
Kalteng	2,56	2,8	0,24
Kepri	2,38	2,6	0,22
NTB	2,59	2,8	0,21
Kaltim	2,6	2,8	0,20
Sulut	2,40	2,6	0,18
Bali	2,13	2,3	0,17
Yogyakarta	1,93	2,1	0,17
Banten	2,34	2,5	0,16
Kalsel	2,34	2,5	0,16
Riau	2,81	2,9	0,05
Babel	2,53	2,6	0,07
Jabar	2,43	2,5	0,07
Sulsel	2,55	2,6	0,05
Sumut	1,01	3	-0,01
Sumbar	2,9	2,8	-0,10
Gorontalo	2,76	2,6	-0,16
Sultenggara	3,19	3	-0,19
Jambi	2,51	2,3	-0,21
Maluku Utara	3,34	3,1	-0,24
NAD	2,79	2,8	-0,01
Bengkulu	2,51	2,2	-0,31
Maluku	3,56	3,2	-0,36
NTT	3,81	3,3	-0,51

*2012 sumber data DKI 2012 *2008 sumber data
susernas

TABEL 2
Distribusi provinsi menurut
peningkatan % akseptor dan perbedaan TFR.

Provinsi	% wanita PUS akseptor 2010 (a)	% wanita PUS akseptor 2012 (b)	Pening- katan	Perbedaan TFR 2012-2008
Indonesia	60,94	61,9	0,96	0,19
Papua	26,97	21,8	-5,17	0,63
Papua Barat	38,48	42,5	4,02	0,53
DKI Jakarta	57,42	57,3	-0,12	0,69
Kalbar	65,59	65,1	-0,49	0,47
Jateng	63,85	65,2	1,35	0,31
Jatim	64,16	65,3	1,14	0,30
Sulbar	48,83	5,22	3,37	0,28
Sulteng	61,08	55,7	-5,38	0,26
Lampung	69,78	70,3	1,02	0,25
Sumsel	65,78	67,6	1,82	0,75
Kalteng	68,16	67,3	-0,86	0,74
Kep.Riau	51,9	53,1	1,2	0,22
NTT	57,75	56	-1,75	0,21
Kaltim	61,01	60,01	-1	0,20
Sulut	68,38	68,9	0,52	0,18
Bali	65,17	66,2	1,03	0,17
Yogyakarta	61,93	69,9	7,97	0,17
Banten	62,18	64	1,82	0,16
Kalsel	68,03	68,3	0,27	0,16
Riau	56,29	61,1	4,81	0,09
Ba-Bel	68,17	69,6	1,43	0,07
Jabar	64,57	62,2	-2,37	0,07
Sulsel	50,01	55,8	5,79	0,05
Sumut	48,67	55,9	7,23	-0,01
Sumbar	53,13	56,9	3,77	-0,01
Gorontalo	64,22	63,2	-1,02	-0,16
Sultra	52,6	51,5	-1,1	-0,19
Jambi	65,8	66,9	1,1	-0,21
Mal-Utara	53,13	53,7	0,57	-0,24
NAD	49,53	46,8	-2,73	0,01
Bengkulu	68,58	64,2	-4,78	-0,31
Maluku	39,54	45,5	5,96	-0,36
NTT	79,89	47,9	8,01	-0,51

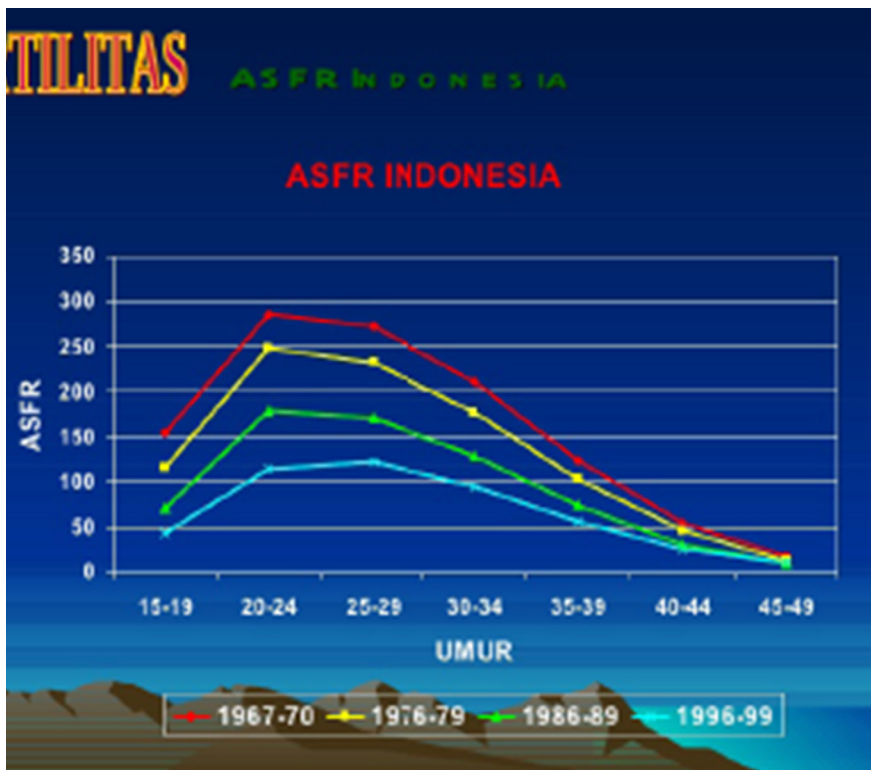
(a) Susenas 2010 (b) SDKI2012



Sumber: Sensus Penduduk 2000

Pada masyarakat di negara berkembang, usia perkawinan pertama cenderung muda sehingga mempunyai masa reproduksi yang panjang, akibatnya nilai fertilitasnya tinggi. Dengan kata lain, semakin cepat usia kawin pertama, semakin besar kemungkinan mempunyai anak. Dapat pula diartikan, makin muda seseorang melangsungkan perkawinannya makin banyak pula anak yang dilahirkan.

Untuk itu, penting bagi BKKBN mengedepankan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kependudukan yang didalamnya ter-
masuk KIE program pengendalian pertumbuhan penduduk, termasuk KIE program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Pendewasaan usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.



Sumber: Sensus Penduduk 2000.

Penundaan usia perkawinan bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja, tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama pun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan.

Pendewasaan usia perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional, yang dapat memberikan dampak pada peningkatan umur kawin pertama sehingga dapat menurunkan TFR. Program penundaan usia perkawinan dapat disosialisasikan melalui program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja) di PIK (Pusat Informasi dan Konseling) Remaja, baik melalui sekolah maupun Karang Taruna, mengingat banyak remaja yang putus sekolah namun tidak paham tentang materi PUP. ■

DAFTAR PUSTAKA

2014, Mita Noveria, Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan.

UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Badan Pusat Statistik, 2014, tentang Produksi Padi

BKKBN 2015-2016, Naskah-naskah pemaparan

Jurnal Keluarga edisi 2015



**Pembangunan Berwawasan Kependudukan
adalah pembangunan yang menjadikan
penduduk sebagai titik sentral
proses pembangunan**



